

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memerlukan pergerakan perekonomian agar tidak terjadi resesi yang nantinya akan menyebabkan berbagai masalah seperti pengangguran dan tingkat kriminalitas akan terus meningkat, Bank sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penghimpun dana yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat sebagai dana kredit serta menjalankan berbagai jasa keuangan lainnya seperti jasa pembayaran, dalam menghadapi situasi Bank sebagai badan usaha yang melakukan bisnis guna mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan fungsinya, bank memiliki berbagai produk unggulan dalam bentuk simpanan yang lazim contohnya Giro, Deposito, dan tabungan yang sesuai dengan pasal 6 UU perbankan. UU perbankan telah mengatur segala kegiatan usaha bank sebagai *core business* bank yang mencakup tiga pelayanan usaha bank yaitu pendanaan (*funding*), kredit (*lending*) serta jasa pelayanan (*services*). Jadi dapat kita simpulkan bahwa bank secara garis besar terdiri dari tiga produk, yaitu simpanan, kredit dan jasa bank.

Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit agar dapat terwujudnya pembangunan nasional. Pada kondisi saat ini peran dan dukungan dari perbankan sangat dibutuhkan sebagai penyedia dana. Sebagaimana yang telah tertuang dalam undang-undang RI Nomor 10

Tahun 1998, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Seperti kebanyakan negara berkembang, sumber utamanya Pembiayaan investasi Indonesia sebagian besar masih didistribusikan Kredit bank. Jadi wajar untuk memperlambat Diduga mengalokasikan kredit bank di Indonesia setelah krisis keuangan 1997 Merupakan salah satu penyebab lambatnya pemulihan perekonomian Indonesia Dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang terkena dampak krisis (Korea Selatan dan Thailand). Meskipun situasi ekonomi makro yang buruk dalam beberapa tahun terakhir Perbaikan relatif tercermin dari inflasi yang terkendali, Nilai tukar stabil dan suku bunga rendah, tetapi kredit tetap Bimbingan bank tidak cukup untuk menjadi mesin penggerak Pertumbuhan ekonomi kembali ke level sebelum krisis Menunjukkan bahwa fungsi perantara bank belum pulih atau Disintermediasi terjadi di industri perbankan. Laporan perbankan menunjukkan bahwa penyebab belum pulihnya fungsi dari intermediasi perbankan disebabkan oleh masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan dan belum lengkapnya sektor riil menyerap sumber kredit. Sementara itu, Konsolidasi internal bank seperti penerapan *good corporate governance* dan manajemen risiko yang baik masih dalam proses penerapan bank. Bank memperhatikan semua hal tersebut karena mempengaruhi rasio kecukupan modal bank atau rasio kecukupan modal. Disisi lain, pada resesi ekonomi pasca krisis, akibat rendahnya prospek investasi dan belum pulihnya kondisi keuangan korporasi,

permintaan kredit dari swasta melemah, yang juga dapat menyebabkan penurunan kredit perbankan.

Bank adalah terminal uang atau perantara antara pihak-pihak yang memiliki dana berlebih dan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Dana berlebih (perorangan dan dunia usaha) dapat digunakan melalui tabungan, giro, dan simpanan dikembalikan dalam bentuk bunga (deposito). Pihak bank akan mengembalikan dana pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dari pihak yang memiliki kelebihan dana berupa pinjaman atau biasa disebut dengan kredit (Noor, 2017). Penanaman dana bank mencakup penanaman dana kepada lembaga keuangan, penanaman dana dalam serta penanaman dana bentuk perkreditan dan penanaman dana ke dalam bentuk aktiva tetap. Tujuan dari penanaman dana adalah untuk memperoleh pendapat yang menghasilkan melalui penciptaan aktiva produktif. Setiap besaran dana yang dihasilkan harus selalu diperhitungkan oleh tiap bank agar pendapatan yang dihasilkan dapat menutup dana yang telah digunakan seperti menutupi biaya operasional, resiko yang diperhitungkan, dan laba yang sudah dikehendaki (Sumartik & Hariasih, 2554).

عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب « إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه : لا يسلك به جرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأنا جازه

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli hewan ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani).

Bank merupakan terminal uang atau lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang kelebihan dana (individu maupun unit usaha) dapat menyimpan dana (uang) mereka di bank dalam bentuk tabungan (saving deposit), giro (demand deposit), dan deposito (time deposit) dengan memperoleh imbalan berupa bunga. Bank akan menyalurkan kembali dana tersebut dari pihak yang kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 2005).

Peran bank sangat penting bagi pihak yang kelebihan dana (uang) dan pihak yang kekurangan dana (uang). Pihak yang kelebihan dana akan mendapatkan imbalan berupa bunga atas dana yang telah di simpan di bank, dan pihak yang kekurangan dana dapat memperoleh dana guna membiayai berbagai kebutuhannya baik untuk keperluan permodalan, investasi maupun kebutuhan konsumsi mereka.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sebagai lembaga perantara, penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi bisnis perbankan. Selain itu, setelah mengalokasikan cadangan utama dan cadangan penunjang, kredit menjadi prioritas ketiga

untuk mengalokasikan dana bank. Pinjaman adalah sumber pendapatan utama bagi hampir setiap bank (Syaifudin, 2019). Kredit memberikan timbal balik yang jelas dalam hal bunga dan waktu, sehingga besaran pendapatan bank dapat diperkirakan. Dengan kredit, bank tidak hanya memperoleh bunga pinjaman, tetapi juga persentase kredit. Hal ini dikarenakan sebagian besar aktivitas perbankan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan aktivitas perkreditan. Dibandingkan dengan jasa lainnya, pendapatan kredit merupakan yang terbesar. Penyaluran kredit dapat membantu masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang serta jasa, dikarenakan segala kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi berkaitan erat dengan penggunaan uang. Kelancaran kemajuan kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tersebut tidak lebih dari kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat. Melalui fungsi tersebut, bank dapat berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*).

Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi dari usaha bank. Di samping itu kredit merupakan prioritas ketiga pengalokasian dana bank setelah alokasi untuk cadangan primer dan cadangan sekunder. Penyaluran kredit merupakan sumber penghasilan utama hampir setiap bank (Siamat, 1993). Mengingat kredit merupakan aktiva produktif atau tingkat penerimaannya tinggi (Triandaru, 2006). Kredit memberikan timbal balik yang pasti dari segi bunga maupun waktu sehingga besarnya pendapatan bank dapat diperkirakan. Dengan adanya kredit, bank tidak hanya mendapatkan bunga pinjaman saja,

akan tetapi juga proporsi dari kredit tersebut. Hal itu mengingat aktivitas bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. Pendapatan dari kredit paling besar dibandingkan dengan jasa-jasa lainnya. Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah

TABEL 1.1.
Perkembangan Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Indonesia

Tahun	Total Kredit (Miliar Rp)
2014	698.695
2015	796.767
2016	1.004.178
2017	1.313.873
2018	1.446.808
2019	1.775.946

Sumber: SEKI 2014 dan 2019

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa permintaan kredit di Indonesia secara nominal senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal itu sangat wajar mengingat Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan pembangunan di segala bidang yang ada di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang atau capital sangatlah vital. Uang yang dimiliki masyarakat yang terbatas mendorong mereka untuk melakukan pinjaman uang dalam bentuk kredit pada lembaga keuangan guna mencukupi kebutuhan finansial mereka dalam kegiatan ekonomi.

TABEL 1.2.
Pertumbuhan dan Konstruksi Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Indonesia

Tahun	Pertumbuhan Kredit (%)				Proporsi Kredit (%)		
	Kredit Modal	Kredit Investasi	Kredit Konsumsi	Total Kredit	Kredit Modal	Kredit Investasi	Kredit Konsumsi
2014	19,98	11,92	26,85	20,53	50,61	19,03	30,36
2015	14,79	11,16	8,49	12,31	52,09	18,79	23,08
2016	21,56	19,12	20,09	20,65	52,69	18,43	28,88
2017	22,31	27,77	23,01	23,57	51,83	19,50	28,67
2018	2,88	16,11	15,95	9,19	48,46	20,56	30,98
2019	20,14	14,52	18,53	18,53	49,44	19,50	30,96

Sumber: SEKI 2014 dan 2019

Dalam tabel 1.2 pertumbuhan permintaan kredit menurut penggunaannya di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2019 selalu berubah-ubah. Secara umum pertumbuhan total permintaan kredit mengalami kenaikan namun pada tahun tertentu saja mengalami penurunan seperti pada tahun 2015 dan 2018. Pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun 2015 sebesar 12,31% dan pada tahun 2018 hanya sebesar 9,19%. Penurunan penyaluran kredit tahun 2015 karena lemahnya permintaan kredit perbankan oleh masyarakat sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat dan sektor riil serta melambatnya pertumbuhan ekonomi, serta naiknya inflasi akibat kebijakan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM memicu meningkatnya inflasi yang menyebabkan dunia usaha berhati-hati dalam produksi sebagai langkah antisipasi. Hal ini berdampak pada perekonomian sektor riil. Rendahnya pertumbuhan kredit tahun 2015 juga dipengaruhi tingginya suku bunga tercermin dari suku bunga BI Rate sebesar 9,75%. Pada tahun 2018 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 9,19% mengingat pertumbuhan sebelumnya sebesar 23,57%, perubahan ini cukup besar dibandingkan perubahan tahun

yang lain. Lambatnya pertumbuhan ekonomilah yang menjadi penyebab melambatnya laju pengucuran kredit (Indiastuti, 2010). Di samping itu menurunnya pertumbuhan akibat demand kredit menurun akibat penurunan kegiatan produksi pasca krisis. Sementara dari sisi supply, untuk mengantisipasi peningkatan risiko kredit, bank menjadi semakin berhati-hati dalam menyalurkan kredit (www.mindcomm-strategy.com). Konstruksi pembentuk kredit terdiri dari kredit modal kerja, investasi dan konsumsi. Konstruksi kredit ini masih didominasi oleh kredit modal kerja, hal ini mengingat kredit modal kerja cukup efektif untuk penyerapan tenaga kerja dan penggerak perekonomian nasional. Namun yang terjadi pada 10 tahun terakhir justru mengalami tren penurunan, dan sebaliknya proporsi untuk kredit konsumsi mengalami tren kenaikan cukup pesat. Kredit konsumsi meningkat disebabkan gencarnya perbankan melakukan promosi kredit konsumsi. Kredit konsumsi dipilih oleh perbankan sebab resiko yang ditanggung lebih kecil dibanding kredit modal kerja. Kemudahan mendapatkan kartu kredit memudahkan masyarakat memperoleh kredit untuk pembiayaan konsumsi mereka, ditambah dengan budaya konsumsi masyarakat yang tinggi disebabkan dari promosi dari barang - barang konsumsi yang gencar. Promosi barang konsumsi itu dibarengi dengan kemudahan kredit oleh perbankan khususnya lembaga pembiayaan mendorong masyarakat mudah mengambil kredit sehingga kredit konsumsi meningkat.

Dalam perspektif kredit pada dasarnya hanyalah satu jenis. Namun, untuk membedakan kredit menurut faktor dan unsur yang ada dalam

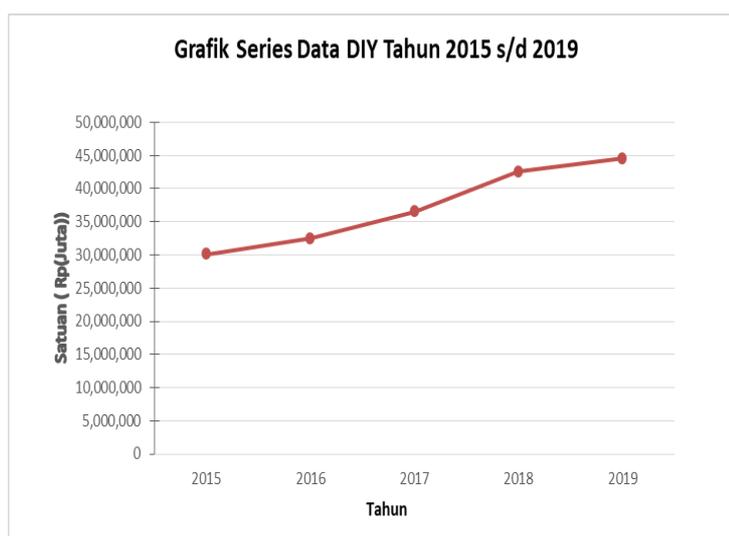
pengertian kredit, maka kita membedakan kredit yang dapat dibedakan menurut tujuan sebagai berikut: jenis penggunaan, permintaan kredit, jangka waktu kredit, metode penggunaan dan jaminan. Menurut jenis penggunaannya, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis (kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi). **Kredit investasi** adalah hutang dengan jangka waktu pengembalian investasi jangka panjang atau menengah. Pemilik perusahaan juga dapat mengajukan hutang untuk mendanai beberapa proyek dalam rencana pemulihan perusahaan atau pengembangan proyek. Untuk dapat melunasi kredit investasi, pemilik perusahaan biasanya menggunakan keuntungan yang didapat dari penggunaan kredit investasi perusahaan. Sedangkan pada **kredit modal kerja** adalah fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan dalam mata uang rupiah atau valuta asing untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sampai dengan satu tahun dalam suatu siklus usaha. Pinjaman modal kerja adalah pinjaman yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha lainnya sebagai dana tambahan untuk meningkatkan usaha yang sedang berjalan dalam kurung waktu minimal satu tahun dan memiliki izin usaha (SIUP, TDP, SITU, NPWP). Sementara itu, **kredit konsumsi** adalah pinjaman yang diberikan oleh bank / lembaga keuangan kepada perorangan, biasanya dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan nasabah atau multiguna. Contoh kredit konsumsi termasuk KPR, kartu kredit dan kredit tanpa jaminan (KTA). Kredit konsumsi umumnya lebih mudah diajukan daripada kredit produktif, dan jangka waktunya lebih lama.

TABEL 1.3.
Perkembangan Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Bank Umum DIY

Tahun	Kredit Menurut Jenis Penggunaan		
	Kredit Modal (Juta Rp)	Kredit Investasi (Juta Rp)	Kredit Konsumsi (Juta Rp)
2015	11.104.349,00	8.307.949,00	13.060.856,00
2016	12.732.730,00	9.218.180,00	14.554.466,00
2017	14.638.739,00	9.895.625,00	18.053.649,00
2018	15.024.446,00	10.986.244,00	18.531.986,00
2019	15.894.494,00	11.087.018,00	18.961.210,00

Sumber: SEKI 2014 dan 2019

Tabel 1.3 menunjukkan selama kurun waktu 5 tahun itu, permintaan kredit di Yogyakarta meningkat. Penyaluran kredit perbankan di Yogyakarta menurut penggunaannya dibagi dalam 3 jenis kredit, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Proporsi kredit tiap tahunnya didominasi oleh kredit modal kerja, disusul kredit konsumsi kemudian kredit investasi. Proporsi kredit modal paling besar porsinya di karenakan di negara berkembang tidak terkecuali Indonesia pembiayaan investasi masih bersumber dari penyaluran kredit perbankan (Harmanta, 2005)



Sumber: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 1.1.
Grafik Perkembangan Kredit

Dalam Tabel 1.1, Berdasarkan penggunaannya, di tahun 2015 perlambatan permintaan pertumbuhan kredit baru terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan kredit konsumen dan perlambatan pertumbuhan kredit modal kerja. Sementara itu, permintaan kredit konsumen untuk Kredit Multiguna dan Kredit Mobil (KKB) mengalami penurunan, dan penurunan permintaan KKB sejalan dengan penurunan penjualan mobil dan motor di awal tahun 2015. Rata-rata penjualan mobil dan sepeda motor pada triwulan I 2015 (Januari s / d Februari) masing-masing turun 0,3% dan 11,1% dari triwulan sebelumnya (q-to-q) tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan yang drastis untuk kredit konsumsi sedangkan pada kredit modal dan kredit investasi mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena tingkat LDR (Loan to Deposits Ratio) atau rasio total kredit terhadap total dana dari pihak ketiga (DPK) di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung lebih rendah, yakni berkisar 62 persen sampai 65 persen. Hal ini dikarenakan warga di Yogyakarta cenderung memilih untuk menabung atau menyimpan uang di bank daripada memilih menggunakannya untuk kredit.

Kenaikan permintaan kredit itu dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabel yang signifikan dan sensitif adalah tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Ketika suku bunga naik permintaan kredit cenderung berkurang dan ketika suku bunga turun akan direspon dengan naiknya permintaan kredit oleh masyarakat. Sebab suku bunga merupakan besar kecilnya kewajiban yang harus dibayarkan atas pinjaman yang diambil.

TABEL 1.4.
Dana Pihak Ketiga dan Giro Wajib Minimum

Tahun	Dana Pihak Ketiga	Giro Wajib Minimum
2015	49.505.018,33	5.819.900,13
2016	53.654.530,00	5.995.063,00
2017	59.361.224,00	6.404.759,00
2018	63.485.957,00	6.713.163,00
2019	67.797.009,00	7.985.563,00

Sumber: Seki 2015 dan 2019

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang digunakan dalam penyaluran kredit. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat. Apabila dana pihak ketiga semakin meningkat maka jumlah kredit yang disalurkan semakin banyak. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Bernanke dan Blinder yang menjelaskan bahwa penyaluran kredit dipengaruhi oleh DPK. (Widyawati & Wahyudi, 2016)

Dalam menyalurkan kredit bank perlu menyisihkan sebagian dari dana sebagai cadangan yang berguna untuk berbagai hal misalnya, apabila nasabah sewaktu-waktu ingin melakukan penarikan dana yang disebut sebagai Giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah sejumlah dana minimum yang disimpan oleh bank yang besarnya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar jumlah persentase tertentu dari DPK. Hal ini dilakukan guna menjalankan kewajiban terhadap penarikan dana yang dilakukan oleh masyarakat sewaktu-waktu.

Dan salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kestabilan ekonomi dapat dilihat dari inflasi dan nilai tukar yang stabil. Stabilitas ekonomi yang baik, dapat mendorong minat dunia usaha untuk investasi baik yang berasal dari dalam

negeri dan juga asing serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi baik dalam konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian dapat berjalan dan tumbuh guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laju inflasi yang stabil dan cenderung rendah tentunya mendukung terpeliharanya daya beli masyarakat, khususnya yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri dan masyarakat kecil. Bagi golongan masyarakat ini, yang umumnya mencakup sebagian besar penduduk, harga-harga yang terus membung menyebabkan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar akan semakin rendah. Demikian pula inflasi dan nilai tukar yang tidak stabil akan mempersulit dunia usaha dalam perencanaan kegiatan bisnis, baik dalam kegiatan produksi dan investasi maupun dalam penentuan harga barang dan jasa yang diproduksi (Widyarto, 2007).

TABEL 1.6.
Inflasi, Nilai Tukar dan Penyaluran Kredit di DI Yogyakarta

Tahun	Inflasi (%)	Nilai Tukar (Rp)	Penyaluran Kredit (Juta Rp)
2014	6,59	9.830	26.145.137
2015	3,09	9.020	30.092.921
2016	2,29	9.419	32.473.154
2017	4,20	10.950	36.505.376
2018	2,66	9.400	42.588.013
2019	2,77	8.991	44.542.677

Sumber: BPS 2019, SEKI 2019, SEKD 2019

Dari tabel 1.6 di atas dapat dilihat bahwa inflasi dan nilai tukar berfluktuasi, sedang permintaan kredit meningkat terus tiap tahunnya. Nilai tukar dan inflasi saling berkaitan. Ketika inflasi mengalami kenaikan, nilai tukar Rupiah terhadap dolar juga cenderung melemah. Namun demikian

meskipun inflasi dan nilai tukar berfluktuasi, permintaan kredit di DI Yogyakarta cenderung meningkat tiap tahunnya.

TABEL 1.7.
Perkembangan PDRB di DI Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2015-2019

TAHUN	PDRB harga konstan 2010 (juta)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	83474451.5	4.95
2016	87685809.6	5.05
2017	92300243.9	5.26
2018	98024264.3	6.2
2019	104489706.4	6.6

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perekonomian di provinsi DI Yogyakarta dapat dikatakan cukup stabil dilihat dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik DIY, ditahun 2015 terjadi peningkatan perekonomian di segala lapangan usaha. Terkecuali, di beberapa sector seperti sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami penurunan sebesar 1,3 persen diantaranya pengadaan listrik dan gas yang hanya tumbuh sebesar 0,09 persen, pengadaan air sebesar 0.11 persen serta pertambangan dan penggalian sebesar 0,57 persen. Sedangkan pada lapangan usaha yang mengalami peningkatan perekonomian terjadi di sektor jasa keuangan yang mengalami laju pertumbuhan sebesar 8,0 persen serta di sektor jasa perusahaan dan jasa pendidikan masing-masing mengalami peningkatan sebesar 7,3 persen. Akan tetapi, dibandingkan dengan tahun 2014 yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 di tahun 2015 cenderung melambat. Di tahun 2016 perekonomian DIY mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2015) sebesar 5.05 persen yang sebelumnya di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4.95 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh nilai tambah pada seluruh bidang usaha dan dari sisi

pengeluaran laju pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah serta pembentukan modal tetap bruto. Perekonomian DIY triwulan IV tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,45 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (rasio triwulanan). Dari sisi produksi, penurunan ini disebabkan oleh pengaruh efek musiman pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, khususnya sub kelompok tanaman pangan yang meningkat sebesar 38,28 persen. Pertumbuhan negatif pada triwulan IV 2016 juga tidak lepas dari pertumbuhan negatif yang signifikan pada sektor komersial yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB, yaitu perdagangan grosir dan eceran serta penyediaan makanan dan minuman. Dari sisi pengeluaran, kontraksi ekonomi pada triwulan IV 2016 (month-on-month) terutama disebabkan oleh pertumbuhan minus komposisi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Dibandingkan dengan triwulan IV 2016, perekonomian DIY pada triwulan IV 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,26 persen (year-on-year), lebih tinggi 4,78 persen dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2016. Dibandingkan dengan triwulan III 2017, perekonomian DIY menyusut sebesar 0,61 persen (triwulan II). Laju pertumbuhan ekonomi DIY (to C to C growth rate) pada tahun 2017 sebesar 5,26 persen, lebih tinggi dari 5,05 persen pada tahun 2016. Secara sektoral, industri konstruksi mencapai pertumbuhan tertinggi di tahun 2017 yaitu sebesar 6,94 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, bagian yang tumbuh paling cepat adalah pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, yaitu 9,61 persen. Penyumbang proporsi pertumbuhan

ekonomi terbesar pada tahun 2017 (c-to-c) di industri pengolahan, terhitung 0,74 persen, diikuti oleh informasi dan komunikasi, terhitung sebesar 0,67 persen dan industri konstruksi menyumbang sebesar 0,65 persen. Sementara itu, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), dari sisi pertumbuhan ekonomi, penyebab kontraksi terbesar dari triwulan IV tahun 2017 adalah turunnya usaha pertanian, khususnya output tanaman pangan. Dari sisi PDRB menurut pengeluaran, porsi terbesar pertumbuhan ekonomi DIY (c-to-c) tahun 2017 masih terdiri dari belanja konsumsi rumah tangga yaitu 3,32 persen, diikuti oleh total pembentukan modal tetap sebesar 1,34 persen dan belanja konsumsi pemerintah 0,45 persen. Di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi DIY (c-to-c) mencapai 6.20 persen mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5.26%. berdasarkan sektoral pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kenaikan sektor konstruksi sebesar 13,1%, dan peningkatan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 10,6%. Di sisi lain, penopang utama pertumbuhan pengeluaran adalah komponen ekspor luar negeri yang meningkat sebesar 12,8%, dan total pembentukan modal tetap juga meningkat pesat sebesar 10,2%. Diukur dari nilai Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB), perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 129,9 triliun rupiah dengan harga berlaku tahun 2018 dan 98 triliun rupiah atas harga konstan tahun 2010. Perekonomian DIY dari kuartal keempat 2018 terhadap kuartal keempat 2017 meningkat sebesar 7,39% (year-on-year), jauh lebih tinggi dibandingkan 5,26% pada periode yang sama tahun 2016. Dibandingkan dengan triwulan III 2018,

perekonomian DIY juga meningkat sebesar 0,66% year-on-year, meskipun terjadi kontraksi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Faktor terbesar pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2018 adalah bisnis konstruksi yaitu 1,25%, diikuti oleh informasi dan komunikasi yang menyumbang 0,72%, diikuti oleh industri pengolahan, terhitung 0,66%. Sementara itu, dari sisi belanja PDRB, porsi terbesar pertumbuhan ekonomi DIY (c-to-c) pada tahun 2018 masih terdiri dari total belanja pembentukan modal tetap dan konsumsi rumah tangga, masing-masing sebesar 2,73% dan 2,37% dan 0,67% dari ekspor.

Perekonomian DIY (C-to-C) pada tahun 2019 meningkat sebesar 6,60 persen, sebelumnya ditahun 2018 sebesar 6,20 persen, merupakan peningkatan perekonomian yang cukup pesat. Dari sisi sektoral, pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan lapangan usaha konstruksi sebesar 14,39 persen, peningkatan penyediaan air bersih, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 8,90 persen, serta peningkatan penyediaan akomodasi makanan serta minuman sebesar 8,89 persen. Di sisi lain, pilar utama pertumbuhan dari sisi pengeluaran adalah komponen pembentukan modal tetap bruto yang meningkat 9,74 persen, belanja konsumsi organisasi nirlaba yang melayani rumah tangga juga meningkat sebesar 9,58 persen, yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dihitung berdasarkan nilai Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) yaitu 141,4 triliun rupiah atas harga berlaku pada tahun 2019 dan 104,5 triliun rupiah atas harga konstan tahun 2010. Dibandingkan dengan triwulan IV 2018, perekonomian DIY pada triwulan IV 2019 tumbuh sebesar 6,16% (year-

on-year) lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan yang sama 2018 yang tumbuh sekitar 7,39 persen. Dibandingkan dengan triwulan III 2018, perekonomian DIY juga meningkat sebesar 0,80% (month-on-month), lebih tinggi 0,66% dari periode yang sama tahun lalu. Kontribusi terbesar terhadap perekonomian pada tahun 2019 berasal dari bidang usaha konstruksi sebesar 1,47%, diikuti oleh akomodasi dan makanan minuman sebesar 0,85%, serta informasi dan komunikasi sebesar 0,83%. Sementara itu, dari sisi belanja PDRB, porsi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tahun 2019 (c-to-c) masih terdiri dari total belanja pembentukan modal tetap dan konsumsi rumah tangga, masing-masing sebesar 2,71% dan 2,24%.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi permintaan kredit perbankan, Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi “**Determinan Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Di Yogyakarta (2014- 2019)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh dari Produk Domestic Bruto terhadap jumlah permintaan kredit perbankan pada bank umum di provinsi Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap jumlah permintaan kredit perbankan pada bank umum di provinsi Yogyakarta?

3. Bagaimana pengaruh Dana pihak ketiga terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di provinsi Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Giro wajib minimum terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di provinsi Yogyakarta?
5. Apakah PDRB, inflasi, DPK dan Giro wajib minimum berpengaruh terhadap jumlah permintaan permintaan kredit perbankan pada bank umum provinsi Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh PDRB Bank Umum Yogyakarta terhadap penyaluran kredit perbankan.
2. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit bank oleh bank umum Yogyakarta
3. Menganalisis pengaruh Dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit bank oleh bank umum Yogyakarta
4. Menganalisis pengaruh Giro wajib minimum terhadap penyaluran kredit bank oleh bank umum Yogyakarta
5. Menganalisis bersama dampak PDRB, inflasi, DPK dan Giro wajib minimum terhadap penyaluran kredit perbankan oleh bank umum di provinsi Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat bagi peneliti

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan wawasan industri perbankan.

2. Manfaat bagi instansi terkait

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan penting guna merumuskan kebijakan terkait perbankan.

3. Manfaat bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terkait kredit perbankan di DI Yogyakarta.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Sebagai landasan penelitian selanjutnya serta pengetahuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti terkait kredit di DI Yogyakarta.

